

## KONSUMSI NON PANGAN RUMAH TANGGA TANI DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL MENURUT KELEMBAGAAN LAHAN DAN TENAGA KERJA PADA USAHATANI

Suwarto

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

### ABSTRACT

*This research aims to find out the effect of land and labor institutions on household non food consumption in Gunung Kidul. The primary data was taken during September to Desember 2005.*

*The result of this research shows that non-food consumption of the owner-operator farmers is not different from the non-food consumption of farmers in other land institutions. Similar to, non food consumption of LKP rented land, is no different from the consumption of farmers in other land institutions. The non-food consumption of forestry tenant land is lower than the consumption of farmers in other land institutions. On the contrary, the non food consumption of farmers who employ royongan labor is higher than one of farmers in other labor institutions. In this case, the non food consumption based on labor institution of upahan, arisan or RTan, and sambatan is not different from the consumption of farmers in other labor institutions. The non food consumption of farmers as seller and servicer is higher than one of other farmers.*

*Key words: land, labor institution, non food consumption*

### PENDAHULUAN

Konsumsi dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. Secara garis besar konsumsi non pangan rumah tangga tani meliputi konsumsi untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, rekreasi, dan lainnya. Nicholson (1998) menjelaskan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan suatu rumah tangga meliputi jenis dan jumlah yang tak terbatas, namun aktivitas konsumsi suatu rumah tangga dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dalam hal ini pendapatan rumah tangga yang rendah menjadi pembatas tingkat konsumsi atau kesejahteraan rumah tangga petani.

Pola konsumsi non pangan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal para petani. Data pada Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2003) menunjukkan adanya perbedaan pola konsumsi non pangan rumah tangga di wilayah tersebut. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pedesaan pada tahun 2002 non pangan menyerap 49,24% dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Pada waktu yang sama, daerah perkotaan yang tingkat pendapatannya lebih tinggi dari daerah pedesaan dengan pola konsumsi, non pangan menyerap 52,96% dari seluruh pengeluaran rumah tangga.

Tingkat konsumsi non pangan dapat dipengaruhi oleh jumlah, jenis, dan kualitas barang yang dikonsumsi (Pindyck dan Rubinfeld, 1991, Katz dan Rosen, 1994). Di samping itu, mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi, Boediono dan Cowley (Juarini, 1995) menyatakan bahwa tingkat konsumsi suatu rumah tangga di antaranya dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah tangga, letak geografis, anggota keluarga, dan harga-harga barang yang dikonsumsi. Sejalan dengan itu, Pindyck dan Rubinfeld (1991), dan Katz dan Rosen (1994) menjelaskan bahwa konsumsi adalah fungsi dari pendapatan rumah tangga. Sebelumnya, dalam bukunya ilmu ekonomi makro yang terkenal, Branson (1989) menerangkan besarnya pengaruh *disposable income* dan *asset* terhadap konsumsi suatu rumah tangga.

Lahan dan tenaga kerja di samping sebagai faktor produksi penting dalam usahatani, juga berlaku sebagai aset. Penguasaan lahan para petani di Pulau Jawa pada umumnya sempit (Badan Pusat Statistik, 2004), sehingga dapat menyebabkan pendapatan usahatani dan produktivitas tenaga kerja rendah. Di samping itu, kebutuhan tenaga kerja pada usahatani terutama pada lahan kering sangat dipengaruhi musim. Dalam hal ini diduga kelembagaan lahan dan tenaga kerja pada usahatani berpengaruh terhadap konsumsi, termasuk konsumsi non pangan para petani.

Selaras dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kelembagaan lahan dan tenaga kerja pada usahatani terhadap konsumsi non pangan para petani.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada dua dusun di Kabupaten Gunung Kidul wilayah tenggara, yaitu di Dusun Widoro Wuni, Desa Balong, Kecamatan Girisubo dan di Dusun Candisari, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari. Semua petani di kedua dusun yaitu 88 KK di Dusun Widoro Wuni dan 137 KK di Dusun Candisari dijadikan responden. Dusun Widoro Wuni adalah dusun yang relatif jauh dari pembinaan, relatif jauh dan sulit mengakses pasar, kurang lebih 37 km tenggara dari ibu kota kabupaten. Dusun Candisari kurang lebih 12 km, sebelah tenggara dari ibu kota kabupaten relatif dekat dengan pusat pembinaan, mudah mengakses pasar. Pengumpulan data primer penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga Desember 2005.

Petani responden menurut kelembagaan lahan meliputi petani pemilik penggarap, penyewa lahan lungguh-kas desa-pengarem arem-milik perseorangan (LKP), penyewa lahan Hamengku Buwono (HB), dan peminjam lahan kehutanan (berusahatani diantara tanaman jati muda milik perhutani). Menurut kelembagaan tenaga kerja pada usahatani, petani dapat dikelompokkan atas petani pengguna tenaga kerja upahan, royongan (upah dibayar setelah panen, yaitu pada waktu *bodo* atau *Idul Fitri*, *rasuly* yaitu acara selamatan bersih desa, dan pada waktu *17an*), arisan atau RTan, sambatan, dan yang hanya menggunakan tenaga sendiri (Lampiran 1). Di samping itu, menurut pekerjaan luar usahatani, petani dapat dibedakan atas pedagang dan penyedia jasa, tukang dan perajin, buruh tani, dan tani saja yaitu tidak memiliki pekerjaan luar usahatani (Lampiran 2)

### Metode Analisis data

Untuk menguji pengaruh kelembagaan lahan, kelembagaan tenaga kerja, dan faktor-faktor lainnya terhadap konsumsi pangan dan non pangan disusun model konsumsi sebagai berikut.

$$\ln C = \ln \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 \ln X_5 + \beta_6 \ln X_6 + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 + \delta_4 D_4 + \delta_5 D_5 + \delta_6 D_6 + \delta_7 D_7 + \delta_8 D_8 + \delta_9 D_9 + \delta_{10} D_{10} + m$$

Keterangan:

C = pengeluaran untuk konsumsi non pangan (ribu Rp/tahun)/indeks harga konsumen (IHK),  $\alpha$  = intersep,  $\beta_i$  = koefisien regresi ( $i = 1$  s/d 6),  $\delta_i$  = koefisien variabel *dummy* ( $i = 1$  s/d 10),  $X_1$  = pendapatan rumah tangga (ribu Rp)/IHK,  $X_2$  = harga beras (Rp/kg)/IHK,  $X_3$  = nilai aset (ribu Rp),  $X_4$  =

jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (orang),  $X_5$  = pendidikan kepala keluarga (tahun sukses),  $X_6$  = umur kepala keluarga (tahun), *Dummy* kelembagaan lahan,  $D_1 = 1$  jika pemilik penggarap,  $D_1 = 0$  jika lainnya,  $D_2 = 1$  jika sewa lahan LKP,  $D_2 = 0$  jika lainnya,  $D_3 = 1$  jika pinjam lahan Kehutanan,  $D_3 = 0$  jika lainnya, *Dummy* kelembagaan tenaga kerja pada usahatani,  $D_4 = 1$  jika tenaga kerja upahan,  $D_4 = 0$  jika lainnya,  $D_5 = 1$  jika tenaga kerja royongan,  $D_5 = 0$  jika lainnya,  $D_6 = 1$  jika arisan atau RTan,  $D_6 = 0$  jika lainnya,  $D_7 = 1$  jika tenaga kerja sambatan,  $D_7 = 0$  jika lainnya, *Dummy* pekerjaan luar usahatani,  $D_8 = 1$  jika pedagang dan jasa,  $D_8 = 0$  jika lainnya,  $D_9 = 1$  jika tukang dan perajin,  $D_9 = 0$  jika lainnya, *Dummy* lingkungan usahatani,  $D_{10} = 1$  jika tempat tinggal dekat dengan pasar atau kota,  $D_{10} = 0$  jika lainnya,  $m$  = error term

### Pengujian Model Regresi

Pengujian model regresi berganda untuk mengetahui apakah tidak terdapat pelanggaran terhadap asumsi klasik yaitu adanya *multikolenearity* dan *heteroskedastisity* atas data *cross section* yang dipergunakan. Jika hasil analisis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah tersebut maka harus dilakukan pengobatan. Selanjutnya pengujian kesesuaian model dilakukan meliputi *adjusted R<sup>2</sup>*, uji F dan uji t (Theil, 1971, Greene, 2003 dan Gujarati, 2003).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari rasio besarnya pengeluaran untuk konsumsi non pangan dengan konsumsi rumah tangga (Nicholson, 1998). Dalam hal ini, rasio pengeluaran tersebut bagi para petani yang dekat dengan kota secara relatif lebih besar dari rasio pengeluaran tersebut bagi para petani yang bertempat tinggal relatif jauh dari kota. Di samping itu, jumlah pengeluaran rumah tangga bagi para petani yang dekat dengan kota secara relatif lebih besar pengeluaran tersebut bagi para petani yang bertempat tinggal relatif jauh dari kota (Tabel 1). Hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat pendapatan.

Pengeluaran konsumsi non pangan menjadi semakin penting dan memperoleh proporsi yang lebih layak jika kebutuhan pangan semakin tercukupi selaras dengan perbaikan kehidupan suatu masyarakat. Mengenai hasil analisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap besarnya konsumsi non pangan pada para petani yang diteliti dapat dicermati hasil analisis regresi berganda pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran untuk Konsumsi Non Pangan atas Keseluruhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Petani Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Tempat Tinggal	Jenis Pengeluaran Konsumsi		
	Non Pangan (Ribu Rp/tahun)	Rumah tangga (Ribu Rp/tahun)	Non Pangan/Rumah Tangga (%)
Dekat dengan kota	2.135	4.183	51,04
Jauh dari kota	1.546	3.453	44,77
Rata-rata	1.904	3.897	48,86

Sumber: Analisis Data Primer

Model yang disusun secara bersama-sama dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel dependen. F-tabel nyata pada taraf kesalahan 5%, dan model tidak mengandung *multikolinierity* yang berarti. Nilai korelasi antar variabel bebas terbesar 0,642 yaitu antara variabel tingkat pendapatan rumah tangga dengan nilai aset. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,73 berarti bahwa 73% dari variasi besarnya konsumsi non pangan petani dapat dijelaskan oleh variabel independen yang disusun dalam model. Namun model mengindikasikan adanya *heteroscedasticity*, hal tersebut ditunjukkan oleh hasil test *heteroscedasticity* nyata. Untuk mengatasi pelanggaran terhadap kaidah *homoscedaticity* tersebut dilakukan dengan menggunakan regresi model *heteroscedasticity*. Nilai *Likelihood Ratio (LR)* nyata pada taraf kesalahan 5%. Model *heteroscedasticity varlin* mendapatkan hasil terbaik dengan 9 koefisien regresi nyata, lebih baik dari model *OLS* dan model *heteroscedasticity* lainnya dipergunakan untuk menjelaskan model regresi.

Elastisitas konsumsi non pangan atas pendapatan rumah tangga 0,53, konsumsi tersebut sejalan dengan teori konsumsi Pindyck dan Rubinfeld (1991), Katz dan Rosen (1994) mengenai perubahan konsumsi karena berubahnya tingkat pendapatan. Jika pendapatan para petani meningkat maka pengeluaran petani untuk biaya kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lainnya akan meningkat. Walaupun demikian, harus dicermati bahwa proporsi pengeluaran petani untuk

kegiatan sosial seperti *selamatan* dan *nyumbang* cukup besar. Sebagian petani menyadari perlunya menekan pengeluaran untuk aktivitas tersebut, namun diakui banyak petani, karena budaya, hal tersebut sulit dilakukan.

Elastisitas konsumsi non pangan atas pendapatan rumah tangga 0,53, konsumsi tersebut sejalan dengan teori konsumsi Pindyck dan Rubinfeld (1991), Katz dan Rosen (1994) mengenai perubahan konsumsi karena berubahnya tingkat pendapatan. Jika pendapatan para petani meningkat maka pengeluaran petani untuk biaya kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lainnya akan meningkat. Walaupun demikian, harus dicermati bahwa proporsi pengeluaran petani untuk kegiatan sosial seperti *selamatan* dan *nyumbang* cukup besar. Sebagian petani menyadari perlunya menekan pengeluaran untuk aktivitas tersebut, namun diakui banyak petani, karena budaya, hal tersebut sulit dilakukan.

Elastisitas konsumsi non pangan atas harga beras 0,455 berarti tingkat konsumsi non pangan akan mengalami peningkatan jika harga beras meningkat. Dalam hal ini dapat dipahami karena beras juga banyak dipergunakan dalam aktivitas sosial petani seperti dalam kegiatan *nyumbang*, *selamatan*, dan *layatan*, sehingga harga beras mempengaruhi pengeluaran non pangan petani. Elastisitas konsumsi non pangan atas nilai aset 0,047, hal tersebut sejalan dengan teori Branson (1989) bahwa nilai aset meningkatkan konsumsi.

Tabel 2. Hasil Analisis Fungsi Konsumsi non Pangan Rumah Tangga Tani (Ln Ribu Rupiah) di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Variabel	Model	OLS		Heteros. (Varlin)	
		Koef. Reg.	t-hit.	Koef. Reg.	t-hit.
Ln pendapatan RT (Rp)/IHK		0,490*	8,626	0,530*	15,81
Ln harga beras (Rp/kg)/ IHK		0,230	0,415	0,455*	2,026
Ln nilai aset (ribu Rp)		0,059*	4,053	0,047*	6,139
Ln anggota kel.kerja (orang)		0,206*	3,997	0,134*	5,508
Ln pendidikan KK (tahun)		0,009	0,862	-0,004	-0,741
Ln umur KK(tahun)		-0,146	-1,945	-0,126*	-3,962
<i>Dummy</i> Kel.lahan					
- Pemilik penggarap		0,013	0,257	-0,343	-1,210
- Sewa LKP		-0,036	-0,394	-0,059	-0,946
- Pinjam lahan Kehutanan		-0,133	-1,124	-0,254*	-10,01
<i>Dummy</i> kel. Tenaga kerja					
- Upahan		-0,026	-0,478	0,005	0,200
- Royongan		-0,031	-0,645	0,042*	2,393
- Arisan atau RTan		-0,019	-0,419	0,002	0,103
- Sambatan		-0,180*	-2,134	0,048	0,655
<i>Dummy</i> pekerjaan luar UT					
- Pedagang dan jasa		0,056	1,174	0,062*	2,110
- Tukang & pengrajin		0,012	0,287	-0,009	-0,341
<i>Dummy</i> lingkungan UT					
- Relatif dekat kota		0,096*	2,378	0,075*	2,999
Konstanta		3,710*	2,202	2,738*	3,972
<i>adjusted</i> R <sup>2</sup>		0,728		0,728	
		F-hitung	38,47*	LR=279,7*	

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: IHK= indeks harga konsumen, LKP= lahan lungguh, Kas Desa, *pengare-are*, dan milik perseorangan, RT= rumah tangga, UT= usahatani, \*)= nyata pada taraf kesalahan 5%.

Elastisitas konsumsi non pangan atas jumlah keluarga yang bekerja 0,134. Jumlah anggota keluarga yang bekerja berarti sebagai faktor produksi baik dalam usahatani maupun pada luar usahatani, yang dalam hal ini meningkatkan kepercayaan petani dalam melakukan konsumsi. Sebaliknya, elastisitas konsumsi non pangan atas umur negatif yaitu -0,126, berarti bahwa konsumsi non pangan menurun seiring bertambahnya umur petani. Hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa para petani yang berumur tua lebih statis, dapat ditandai dengan lebih rendahnya pendapatan luar usahatani. Pendidikan formal petani tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi non pangan. Hal tersebut diduga dengan keragaan kelembagaan lahan dan tenaga kerja atau dengan keragaan usahatani dan peluang berusaha luar usahatani dewasa ini maka tingkat pendidikan petani yang rata-rata 5 tahun, tidak berpengaruh nyata terhadap variasi konsumsi non pangan petani.

Menurut kelembagaan lahan, konsumsi non pangan petani pemilik penggarap tidak berbeda dengan konsumsi tersebut pada petani pada kelembagaan lahan lainnya.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh variasi yang relatif besar pada konsumsi non pangan pada petani pemilik penggarap, seperti pada petani pemilik penggarap yang menggunakan tenaga kerja sambatan, yang relatif berumur dan hanya beranggotakan dua jiwa. Demikian pula konsumsi non pangan petani penyewa lahan LKP tidak berbeda dengan konsumsi tersebut pada petani lainnya. Dalam hal ini dapat disebabkan akumulasi dari pengaruh karakteristik petani seperti umur, pendidikan, dan pemilikan aset (Lampiran 3), serta interaksi para petani dalam mengonsumsi. Konsumsi non pangan peminjam lahan Kehutanan lebih rendah dari konsumsi non pangan para petani pada kelembagaan lahan lainnya. Hal tersebut dapat berkenaan dengan perbedaan karakteristik, seperti luas penguasaan lahan yang relatif paling sempit (Lampiran 1).

Konsumsi non pangan para petani yang menggunakan tenaga kerja *royongan* pada usahatani lebih besar dari konsumsi tersebut pada para petani pada kelembagaan tenaga kerja lainnya.

Para petani yang menggunakan tenaga kerja *royongan* terutama para anggota kelompok kerja *royongan* sendiri yang sering disebut kelompok *tabungan*, kelompok *buruhan*, kelompok *rasul*, *bodo*, atau *17an*, sesuai pembagian upah kerja. Para petani anggota kelompok tersebut banyak bekerja hingga pada lahan petani lain di luar desa tempat tinggal petani. Pola pembagian upah buruh sekali dalam setahun dapat memperbesar pengeluaran konsumsi non pangan, terutama untuk kegiatan *selamatan*. Konsumsi non pangan para petani menurut kelembagaan tenaga kerja pada usahatani yaitu *upahan*, *arisan* atau *RTan*, dan *sambatan* dengan para petani lainnya tidak berbeda. Berarti tingkat konsumsi tersebut lebih dipengaruhi oleh variabel lain seperti tingkat pendapatan dan variabel lokasi tempat tinggal petani sebagai akses ke tempat-tempat pelayanan atau pasar.

Konsumsi non pangan para petani yang sebagai tukang dan perajin tidak berbeda dengan konsumsi tersebut bagi para petani lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan olen pola interaksi para petani sehingga menyebabkan konsumsi non pangan sebagaimana pada konsumsi pangan (Tabel 2) tidak berbeda.

Konsumsi non pangan para petani yang sebagai pedagang dan penyedia jasa lebih besar dari tingkat konsumsi tersebut bagi para petani lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan perbedaan pendapatan rumah tangga tani. Dalam hal ini para petani sebagai pedagang dan penyedia jasa relatif lebih banyak tinggal dekat kota (Lampiran 2). Dalam hal ini para petani yang relatif dekat kota dapat memperoleh pendapatan luar usahatani, dan pendapatan rumah tangga tani lebih besar dari pendapatan tersebut bagi para petani yang jauh dari kota. Di samping itu, para petani yang relatif dekat kota atau pasar juga lebih mudah menjangkau tempat-tempat pelayanan dan pasar, sehingga konsumsi non pangan petani yang relatif dekat kota atau pasar lebih besar dari konsumsi tersebut pada petani yang jauh dari kota atau pasar.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Konsumsi non pangan petani peminjam lahan Kehutanan lebih rendah dari konsumsi tersebut pada para petani dalam kelembagaan lahan lainnya. Konsumsi non pangan petani pemilih penggarap tidak berbeda dengan konsumsi tersebut pada para petani pada kelembagaan lahan lainnya. Demikian pula konsumsi non pangan petani penyewa LKP tidak berbeda dengan

konsumsi tersebut pada para petani pada kelembagaan lahan lainnya. Konsumsi non pangan petani pengguna tenaga kerja *royongan* lebih tinggi dari konsumsi tersebut bagi para petani pada kelembagaan tenaga kerja lainnya. Dalam hal ini konsumsi non pangan para petani pengguna tenaga kerja upahan, dan pengguna tenaga kerja *sambatan* tidak berbeda dengan konsumsi tersebut pada para petani yang menggunakan tenaga kerja pada kelembagaan tenaga kerja lainnya. Konsumsi non pangan petani yang sebagai pedagang dan penyedia jasa lebih tinggi dari konsumsi tersebut pada para petani lainnya. Demikian pula konsumsi non pangan para petani yang bertempat tinggal relatif dekat kota lebih besar dari konsumsi tersebut bagi para petani yang bertempat tinggal relatif jauh dari kota.

### Implikasi Kebijakan

Rendahnya tingkat konsumsi pangan dan non pangan peminjam lahan Kehutanan dapat disebabkan oleh sempitnya luas penguasaan lahan dan pendapatan rumah tangga tani. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan petani peminjam lahan kehutanan di antaranya dengan meningkatkan luas konsesi penguasaan lahan usahatani. Tingginya konsumsi non pangan para petani yang tergabung dalam kelembagaan tenaga kerja *royongan* dapat berkenaan dengan penerimaan hasil kerja (buruh) yang diterima se tahun se kali pada saat hari besar, *bodo*, *rasul*, dan *17an*. Di samping itu, proporsi konsumsi non pangan terhadap pendapatan rumah tangga tani cukup tinggi, di samping upaya-upaya ke arah peningkatan pendapatan rumah tangga tani, juga diperlukan penyadaran para petani untuk dapat menekan konsumsi yang diakui banyak petani memberatkan, seperti kegiatan *nyumbang*, dan *selamatan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta, 2004. *Yogyakarta dalam Angka 2003*. BPS Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta.
- BPS Badan Pusat Statistik, 2004. *Sensus Pertanian 2003, Seri A3, Angka Nasional Hasil Pendaftaran Rumah Tangga*. BPS Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Branson, W.H. 1989. *Macroeconomic Theory and Policy*. Harper & Row, New York.
- Darwanto, H.D., 2007. *Perluakah Pengendalian Harga Beras? Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 19 Februari 2007.
- Greene, W.H., 2003. *Econometric Analysis*. Fifth Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

- Gudjarati, D.N., 2003. *Basic Econometrics*, Forth Ed. Mc Graw Hill. Boston.
- Harsono, B. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Hartono, S., 2003. "Pengembangan Bisnis Petani Kecil." Sri Widodo (ed). *Peranan Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional*. Liberty, Yogyakarta:11-26.
- Juarini, 1995. "Sumber Pendapatan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga Tani di Desa Miskin, Kabupaten Gunung Kidul." *Tesis Ekonomi Pertanian*. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Katz, M.L. and H.S. Rosen, 1994. *Microeconomics*, Second Ed. Irwin, Burr Ridge, Illinois.
- Nachrowi, N.D. dan H. Usman, 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Nicholson, W., 1996. *Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions*, Seventh Edition. The Dryden Press, Harcourt Brace Collage Publishers, Fort Worth Philadelphia.
- Pindyck, R.S and D.L. Rubinfeld, 1991. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Third Ed. McGraw-Hill, Inc. New York.
- Supranto, J. 1983. *Ekonometrik*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Theil, H., 1971. *Introduction to Econometric*. Prentice Hall of India. New Delhi.
- Tohir, K.A., 1991. *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani Indonesia*. Renata Cipta. Jakarta

Lampiran 1. Petani Responden berdasarkan Kelembagaan Lahan dan TenagaKerja di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Kel. Naker	Kelembagaan Lahan										UT ha/K K	TP ha/K K
	Milik		Sewa LKP		Sewa LHB		Pnj LHut		Jumlah			
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%		
Lokasi dekat dengan pasar/pekerjaan luar usahatani (1)												
Upahan	22	19	2	25	0	0	1	20	25	18	0,64	0,49
Royongan	39	33	2	25	1	14	2	40	44	32	0,69	0,52
Arisan	36	31	1	12	4	57	1	20	42	31	0,64	0,46
Sambatan	4	3	0	0	0	0	0	0	4	3	0,47	0,29
Sendiri	16	14	3	38	2	29	1	20	22	16	0,24	0,20
Jum(1)	117	85	8	6	7	5	5	4	137	100		
Ha/KK	0,62 <sub>1</sub>	0,45 <sup>2</sup>	0,39 <sup>1</sup>	0,25 <sub>2</sub>	0,49 <sub>1</sub>	0,41 <sub>2</sub>	0,38 <sub>1</sub>	0,38 <sub>2</sub>			0,58	0,44
Lokasi jauh dengan pasar/pekerjaan luar usahatani (2)												
Upahan	14	20	0	0	1	5	0	0	15	17	0,66	0,52
Royongan	9	13	0	0	3	17	0	0	12	14	1,007	0,57
Arisan	15	22	0	0	4	22	0	0	19	21	0,61	0,53
Sambatan	6	9	0	0	0	0	0	0	6	7	0,62	0,33
Sendiri	22	36	1	100	10	56	0	0	36	41	0,34	0,25
Jum(2)	69	78	1	0	18	21	0	0	88	100		
Ha/KK	0,61 <sub>1</sub>	0,43 <sup>2</sup>	0,30 <sup>1</sup>	0,28 <sub>2</sub>	0,40 <sub>1</sub>	0,34 <sub>2</sub>	0,00 <sub>1</sub>	0,00 <sub>2</sub>			0,57	0,41
Jum1+2	186	83	9	4	25	11	5	2	225	100		
1+2 Ha/KK	0,61 <sub>1</sub>	0,44 <sup>2</sup>	0,34 <sup>1</sup>	0,26 <sub>2</sub>	0,42 <sub>1</sub>	0,36 <sub>2</sub>	0,38 <sub>1</sub>	0,38 <sub>2</sub>			0,58	0,42

Sumber: Analisis Data primer

Keterangan: LKP= lahan lungguh, kas desa, *pengareng-areng*, dan milik perseorangan, LHB = lahan milik Hamengku Buwono, Pnj. LHut= pinjam lahan Kehutanan, UT = lahan usahatani, TP= lahan tanaman pangan, <sup>1</sup>) = UT, <sup>2</sup>)=TP

Lampiran 2. Petani sesuai Kelembagaan Tenaga Kerja pada Usahatani dan Luar Usahatani di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Kelembagaan Tenaga Kerja Pada usahatani	Pekerjaan Luar Usahatani									
	Buruhtani		Dagang&Jasa		Tukang&rajin		Tani saja		Jumlah	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Lokasi dekat dengan pasar/pekerjaan luar usahatani (1)										
Upahan	1	6	13	27	8	14	3	23	25	8
Royongan	4	25	15	31	22	37	3	23	44	32
Arisan	6	37	17	35	18	31	1	8	42	31
Sambatan	0	0	0	0	2	3	2	16	4	3
Sendiri	5	31	4	8	9	15	4	31	22	16
Jumlah (1)	16	12	49	35	59	43	13	10	137	100
Lokasi jauh dengan pasar/pekerjaan luar usahatani (2)										
Upahan	5	12	2	8	5	28	3	16	15	17
Royongan	4	10	1	9	3	17	4	21	12	14
Arisan	10	25	5	45	4	22	0	0	19	22
Sambatan	1	3	0	0	0	0	5	26	6	7
Sendiri	20	50	3	27	6	33	7	37	36	41
Jumlah (2)	40	45	11	13	18	20	19	22	88	100
Jumlah (1+2)	56	25	60	27	77	34	32	14	225	100

Sumber: Analisis Data Primer

Lampiran 3. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005

Petani pada Kel.lahan & Naker	Kepala Keluarga		Karakteristik Petani				
	(orang)	(%)	Umur (th)	Pendidikan (th)	ART (jiwa)	Modal ternk (RibuRp)	Aset (RibuRp)
Pemilik	186	83	52	5	4	3.419	1.759
Sewa LKP	9	4	43	4	3	2.033	903
Sewa LHB	25	11	50	5	4	3.390	504
Pnj Lhut	5	2	47	2	3	1.328	2.188
Upahan	40	18	51	5	4	3.991	2.794
Royongan	56	25	51	5	4	3.671	1.868
Arisan	61	27	52	5	4	3.306	1.689
Sambatan	10	4	69	0	2	1.986	601
Sendiri	58	26	47	4	4	2.738	578
>=0.5ha	81	36	54	4	4	3.910	2.042
<0.5ha	144	64	48	5	3	2.619	1.076
Dekat kota	137	61	52	5	4	2.880	2.319
Jauh kota	88	39	50	5	4	3.928	468
Rata-rata	225	100	51	5	4	3.314	1.595

Sumber: Analisis Data Primer

Keterangan: LKP= lahan lungguh, kas desa, *pengarem-arem* dan milik perseorangan, LHB = lahan milik Hamengku Buwono, Pnj. Lhut= pinjam lahan Kehutanan, ART = anggota rumah tangga